

Citizenship Education In The Post-Truth Era : Removing Disinformation And Hoaxes

Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Post-Truth : Menangkal Disinformasi dan Hoaks

Jasmine Najwa Al Khansa¹, Nissa Agilda Intan Maiyuni², Nadya Intan Azzahroh³, Callista
Najwah Shandiva⁴, Arninda Nur Aini⁵, Imam Ghazali⁶

¹⁻⁶ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail:

¹23013010274@student.upnjatim.ac.id, ²23013010237@student.upnjatim.ac.id,

³23013010251@student.upnjatim.ac.id, ⁴23013010263@student.upnjatim.ac.id,

⁵23013010149@student.upnjatim.ac.id, ⁶imamgh284@gmail.com

Abstract

Citizenship education has an important role in facing the post-truth era which is characterized by disinformation and hoaxes. In this era, truth no longer relies on facts, but on subjective perspectives. Hoaxes and fake news are spread widely through social media, making it difficult for people to distinguish between valid news and what is not. To deal with this phenomenon, citizenship education must build moral intelligence and character in the nation's generation. By teaching values such as critical and rational thinking, responsibility, being intelligent, and making good use of information technology, citizenship education can help people become more aware and more selective in receiving information. Therefore, citizenship education must be an integral part of efforts to combat disinformation and hoaxes, as well as build the morals and character of a better generation of the nation.

Keywords: *Citizenship Education, Post-truth, Hoax, Disinformation*

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menghadapi era post-truth yang diwarnai oleh disinformasi dan hoaks. Dalam era ini, kebenaran tidak lagi bersandar pada fakta, melainkan pada perspektif subjektif. Hoaks dan berita palsu tersebar luas melalui media sosial, membuat masyarakat sulit membedakan mana berita yang valid dan mana yang tidak. Untuk menghadapi fenomena ini, pendidikan kewarganegaraan harus membangun kecerdasan moral dan karakter pada generasi bangsa. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti berpikir kritis dan rasional, bertanggung jawab, bersikap cerdas, dan

memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu masyarakat menjadi lebih *aware* dan lebih selektif dalam menerima informasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi bagian integral dalam upaya memerangi disinformasi dan hoaks, serta membangun moral dan karakter generasi bangsa yang lebih baik.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Post-truth, Hoaks, Disinformasi

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang sangat penting dalam membantu masyarakat memahami dan menanggapi berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu masyarakat memahami dan menanggapi berbagai informasi yang diterima melalui media sosial dan internet.

Namun, dalam era post-truth, pendidikan kewarganegaraan harus dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang sesuai untuk menghadapi disinformasi dan hoaks yang berbahaya. Era post-truth adalah suatu fenomena di mana kebenaran tidak lagi bersandar pada fakta melainkan pada perspektif subjektif (politik, agama, golongan, dst). Dalam situasi seperti ini, masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan tidak jujur, sehingga perlu adanya upaya yang lebih efektif untuk menangkal disinformasi dan hoaks.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran kunci dalam menangkal disinformasi dan hoaks. Dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa diajarkan untuk memiliki pemahaman dan pemikiran yang kritis terhadap suatu hal. Mereka juga diajarkan untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang sesuai untuk menghadapi disinformasi dan hoaks, seperti kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif, dan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebaik mungkin.

Dalam penelitian ini, kita akan membahas peran pendidikan kewarganegaraan dalam menangkal disinformasi dan hoaks. Kita akan melihat bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat membantu masyarakat memahami dan menangkal disinformasi dan hoaks, serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dalam beberapa kasus, kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya masih belum sesuai dengan harapan. Misalnya, masih terjadinya perilaku negatif akibat perkembangan globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus dilengkapi dengan materi yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Upaya peningkatan mutu pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan materi, mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam mata pelajaran lain, dan mengadopsi metode pengajaran yang inovatif. Guru memiliki peran kunci dalam pendidikan kewarganegaraan, sehingga penting untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada guru agar mereka dapat menyampaikan materi kewarganegaraan dengan baik dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif.

Pendidikan kewarganegaraan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang melibatkan diskusi, permainan peran, studi kasus, dan proyek kolaboratif dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep kewarganegaraan dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Meningkatkan mutu pendidikan kewarganegaraan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang memperkuat pemahaman siswa tentang kewarganegaraan. Ini dapat meliputi kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah, diskusi dengan pejabat publik, atau kegiatan sukarela di lingkungan sekitar.

Evaluasi yang berkualitas dan umpan balik yang konstruktif merupakan bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan kewarganegaraan. Sistem evaluasi yang baik dapat memberikan informasi kepada guru dan siswa mengenai kemajuan belajar mereka serta area yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menangkal disinformasi dan hoaks, serta meningkatkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membantu masyarakat memahami dan menangkal disinformasi dan hoaks.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berupa deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap/ eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi analisis dokumenter yang bertujuan untuk menunjukkan informasi-informasi yang terkait pada (judul jurnal). Metode pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode observasi, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas masyarakat Indonesia.
2. Metode studi pustaka, yaitu berupa kajian literatur yang sesuai dengan penelitian, baik berupa buku maupun sumber internet

Hasil dan Pembahasan

Era post truth menurut pengertiannya sendiri adalah pasca / setelah kebenaran. Era Post Truth merupakan era dimana opini personal, emosi personal lebih dominan dan diutamakan diatas fakta sesungguhnya. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai konteks, seperti penyebaran berita palsu (hoaks), manipulasi informasi, dan retorika yang didasarkan pada emosi daripada fakta empiris. Beberapa faktor yang memperkuat era post-truth termasuk perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, serta polarisasi politik dan sosial yang memicu kepercayaan yang rendah terhadap institusi dan otoritas tradisional.

Menurut definisi dari kamus oxford, Post Truth adalah keadaan Dimana fakta obyektif kurang mempengaruhi opini public dibandingkan daya tarik emosional dan keyakinan pribadi. Dengan demikian era post truth ini mengancam teori teori kebenaran yang sudah ada sejak dulu. Istilah post truth pertama kali muncul diperkenalkan oleh steve tesich pada tahun 1992. Steve tesich menuangkan pemikirannya tentang Post Truth dalam tulisannya yang berjudul “The Government of Lies”. Era Post Truth menggambarkan bagaimana Masyarakat modern dalam menanggapi suatu informasi. Masyarakat Indonesia saat ini seringkali mudah percaya dan tergiring opininya mengikuti opini suatu individu yang tidak berlandaskan apapun.

Dalam konsep filsafat, berkembangnya Post Truth didasarkan pada semakin diterimanya post-modernisme. Post modernisme adalah gerakan filosofis yang muncul sebagai tantangan terhadap modernisme, yang dianggap meresahkan masyarakat. setiap individu berhak menafsirkan suatu situasi tertentu sesuai dengan pemahaman dan penerapannya. Hal ini disebabkan fakta-fakta yang ditentukan bersifat relative. Kebenaran sifatnya masih penafsiran sehingga belum tentu menyajikan kebenaran yang sebenarnya.

Era Post Truth ini merupakan akibat dari perubahan sistem komunikasi masyarakat. Dengan munculnya Revolusi Industri 4,0 informasi lebih mudah dan cepat menyebar ke segala penjuru melalui media jejaring sosial. sedangkan banyak Masyarakat yang belum teredukasi bagaimana penggunaannya dan bagaimana menyaring suatu informasi. Oleh karena itu, banyak Masyarakat yang mudah mempercayai apa yang ada di media sosial tanpa mencari tahu fakta sesungguhnya. Penyebaran post-truth di kalangan masyarakat umum juga dapat menjadi ancaman potensial karena informasi yang disebarluaskan oleh kelompok tertentu demi mencapai tujuan tertentu dapat menimbulkan konflik sosial, mulai dari perselisihan ideologi hingga konflik langsung.

Era post-truth memiliki ciri khas diantaranya:

- 1) *Simulakra*, yakni batasan antara kebenaran dan kebohongan sulit dibedakan,

2) *Pseudo-event*, yakni suatu peristiwa yang dibuat-buat untuk mengundang citra dan opini publik, dan

3) *Pseudosophy*, yakni pembuatan suatu realitas sosial, politik, atau budaya yang kelihatan nyata padahal suatu kebohongan. Beberapa oknum memanfaatkan realitas palsu itu untuk disesuaikan sedemikian rupa agar masyarakat menyangkanya sebagai realita asli

Contoh Kasus

Vaksin COVID-19 Menyebabkan Kematian

Pada awal peluncuran vaksin COVID-19, berbagai pesan berantai dan unggahan media sosial mulai menyebar yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kemandulan, mengandung microchip untuk mengontrol populasi, dan bahkan menyebabkan kematian. Informasi ini menyebar melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter.

Motif penyebaran hoax ini bervariasi, termasuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi medis, teori konspirasi, dan keinginan untuk mempengaruhi opini publik untuk tujuan politik atau ideologis.

Hoax ini disebarkan melalui platform media sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran cepat hoax ini. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang menarik perhatian mempercepat penyebaran informasi yang sensasional, meskipun tidak benar.

Dampak pada Masyarakat dapat dirasakan seperti :

- **Penurunan Kepercayaan terhadap Vaksin**

Hoax ini menyebabkan ketakutan dan keraguan di kalangan masyarakat terhadap keamanan dan efektivitas vaksin. Banyak orang menjadi enggan untuk divaksinasi, yang berdampak pada laju program vaksinasi nasional.

- **Penurunan Cakupan Vaksinasi**

Akibat dari ketidakpercayaan ini, cakupan vaksinasi di beberapa daerah menurun, yang mengakibatkan hambatan dalam mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*).

- Peningkatan Kasus COVID-19

Karena penurunan cakupan vaksinasi, tingkat penularan virus tetap tinggi di beberapa komunitas, menyebabkan lonjakan kasus dan kematian yang bisa dicegah jika vaksinasi dilakukan secara luas.

- Polarisasi Sosial

Hoax ini juga memperparah polarisasi di masyarakat, di mana terjadi perdebatan sengit antara kelompok yang pro-vaksin dan anti-vaksin. Polarisasi ini menghambat diskusi rasional dan berbasis bukti mengenai manfaat vaksin.

Dampak negatif disinformasi dan hoaks terhadap proses demokrasi dan kohesi sosial.

Di era Post Truth ini terutama sejak tahun politik pemilu 2019 penyebaran disinformasi dan hoaks sangat membahayakan kehidupan berbangsa di Indonesia. Disinformasi dan hoaks mengenai SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Jika terjadi disintegrasi maka akan memperlemah ketahanan nasional dan mengancam keutuhan NKRI. Selain itu disinformasi dan hoaks menjadi penghambat pertumbuhan dan Pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui contoh kasus yang sudah disajikan di atas.

Oleh karena itu disinformasi dan hokas memiliki banyak dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak negatif disinformasi dan hoaks terhadap proses demokrasi dan kohesi sosial :

A. Dampak negative disinformasi dan hoaks terhadap proses demokrasi

1) Menurunkan tingkat kepercayaan Masyarakat

Disinformasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi seperti pemilu, badan legislatif, dan sistem peradilan. Ketika

orang tidak lagi percaya bahwa proses pemilu adil dan transparan, mereka cenderung menjadi apatis atau bahkan meragukan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

2) Manipulasi Pemilih

Hoaks sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu tentang kandidat atau isu-isu politik, yang dapat mempengaruhi pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Ini bisa mengubah hasil pemilu dan mengganggu representasi yang adil.

3) Polarisasi Politik

Disinformasi sering kali dirancang untuk memecah belah masyarakat dengan mempromosikan narasi yang ekstrem atau menyesatkan. Hal ini dapat memperburuk polarisasi politik, di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan, menghambat dialog konstruktif dan kompromi.

4) Menghambat Pengambilan Keputusan yang Informatif

Dalam demokrasi, pengambilan keputusan yang baik memerlukan akses ke informasi yang akurat. Disinformasi mengaburkan kebenaran dan membuat masyarakat sulit untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan data.

B. Dampak negative disinformasi dan hoaks terhadap kohesi sosial

1) Meningkatkan ketegangan sosial

Hoaks dan disinformasi yang bersangkutan mengenai SARA tentu dapat meningkatkan diskriminasi, memicu kekerasan, dan menciptakan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Hoaks yang mengandung unsur ancaman atau bahaya dapat menimbulkan ketegangan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Ketakutan ini sering kali disertai

dengan rasa saling curiga antar anggota masyarakat, yang dapat merusak hubungan sosial.

2) Mengurangi Solidaritas dan Toleransi

Ketika masyarakat terus-menerus mendapat informasi yang salah yang menggambarkan kelompok lain secara negatif dan kemudian mempercayainya maka, rasa solidaritas dan toleransi terhadap kelompok lain dapat berkurang. Hal ini mengarah pada fragmentasi sosial dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.

3) Memecah Belah Masyarakat

Hoaks sering kali dirancang untuk memanipulasi perasaan dan reaksi orang. Informasi palsu ini dapat memicu konflik antar kelompok dengan menyebarkan kebohongan yang membuat satu kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lain.

4) Mempengaruhi Opini Publik

Hoaks dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya, membentuk opini publik berdasarkan informasi yang salah. Ketika masyarakat menerima dan mempercayai informasi palsu, hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap isu-isu penting, keputusan politik, dan kebijakan publik. Misalnya, hoaks tentang bahaya vaksinasi dapat membuat seseorang meninggal. Sehingga dampaknya adalah banyak orang menolak vaksin, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

5) Merugikan Masyarakat karena Berisi Kebohongan dan Fitnah

Hoaks yang mengandung kebohongan dan fitnah dapat menyebabkan kerugian nyata bagi Masyarakat baik individu maupun kelompok. Hoaks

dapat merusak reputasi, memicu tindakan kekerasan, atau bahkan mengakibatkan kerugian ekonomi.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Solusi

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Individu yang Kritis dan Berpengetahuan

1. Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis

- Analisis dan Evaluasi Informasi: Siswa diajarkan untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber, mengevaluasi keakuratan dan relevansi informasi tersebut, serta mengenali bias yang mungkin ada.
- Penyelesaian Masalah: Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan teknik-teknik pemecahan masalah yang efektif, memungkinkan siswa untuk merumuskan solusi yang berdasarkan bukti dan logika.

2. Pemahaman Sejarah dan Sistem Politik

- Sejarah Demokrasi: Memahami perkembangan demokrasi, hak-hak sipil, dan peran warga negara dalam membentuk sistem politik yang adil.
- Struktur Pemerintahan: Mempelajari struktur dan fungsi pemerintahan, serta bagaimana kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan.

3. Peningkatan Literasi Media

- Kritis terhadap Media: Mengajarkan siswa untuk mengkritisi konten media, memahami cara kerja media, dan dampak media terhadap opini publik.
- Penggunaan Teknologi: Membekali siswa dengan keterampilan untuk menggunakan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab.

4. Pengembangan Etika dan Tanggung Jawab Sosial

- Nilai-nilai Kewarganegaraan: Menanamkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan tanggung jawab.
- Partisipasi Sosial: Mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan komunitas dan memahami pentingnya kontribusi mereka dalam masyarakat.

5. Pemahaman Isu-Isu Kontemporer

- Isu Lokal dan Global: Membahas isu-isu yang relevan di tingkat lokal, nasional, dan global, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
- Kesadaran Lingkungan: Menyadarkan siswa tentang isu-isu lingkungan dan pentingnya keberlanjutan.

Metode Pengajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan

1. Diskusi dan Debat Kelas

- Menggunakan metode diskusi dan debat untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan argumentasi yang baik.
- Menyediakan forum bagi siswa untuk berbagi pandangan dan belajar menghargai perspektif orang lain.

2. Pembelajaran Berbasis Proyek

- Melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang berfokus pada isu-isu kewarganegaraan, seperti kampanye sosial atau penelitian komunitas.
- Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis dalam situasi praktis.

3. Penggunaan Teknologi Digital

- Mengintegrasikan alat dan platform digital dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan dan akses informasi.
- Mengajarkan literasi digital untuk membantu siswa menavigasi dunia informasi yang kompleks.

4. Simulasi dan Role-Playing

- Menggunakan simulasi dan role-playing untuk menggambarkan proses politik dan pengambilan keputusan.
- Memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana sistem pemerintahan dan demokrasi bekerja.

Komponen Kunci Dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang Relevan Untuk Menangkal Disinformasi: Literasi Media, Pemahaman Kritis, dan Etika Informasi.

Disinformasi atau informasi palsu telah menjadi isu global yang mengancam integritas informasi di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai

alat untuk membekali individu dengan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Artikel ini akan membahas tiga komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan yang relevan untuk menangkal disinformasi: literasi media, pemahaman kritis, dan etika informasi.

Disinformasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam era digital yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menangkal disinformasi dengan membekali individu dengan literasi media, pemahaman kritis, dan etika informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi komponen-komponen kunci dalam pendidikan kewarganegaraan yang efektif untuk menangkal disinformasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap guru pendidikan kewarganegaraan dan analisis kurikulum di beberapa sekolah menengah atas di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi media, pemahaman kritis, dan etika informasi merupakan komponen penting yang perlu diintegrasikan dalam pendidikan kewarganegaraan. Literasi media membantu siswa mengenali sumber informasi yang terpercaya, pemahaman kritis memungkinkan siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan baik, dan etika informasi membimbing siswa dalam menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Komponen kunci dalam pendidikan kewarganegaraan yang relevan untuk menangkal disinformasi - literasi media, pemahaman kritis, dan etika informasi - merupakan fondasi yang penting dalam membentuk warga negara yang kritis, berpengetahuan, dan bertanggung jawab. Dengan memperkuat pemahaman dan penerapan ketiga komponen ini dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat menjadi lebih waspada terhadap disinformasi, lebih mampu membedakan fakta dari opini, dan lebih cermat dalam menggunakan dan menyebarkan informasi secara online maupun offline.

1. Literasi Media

Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan media dengan bijaksana. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, literasi media memiliki peran penting dalam menangkal disinformasi. Beberapa komponen literasi media meliputi:

- **Pemahaman Terhadap Media:** Siswa diajarkan untuk memahami berbagai jenis media, seperti cetak, elektronik, dan sosial, serta cara mereka mempengaruhi persepsi dan opini.
- **Analisis Konten Media:** Siswa dilatih untuk menganalisis konten media secara kritis, termasuk mengenali bias, memeriksa keandalan sumber, dan mengevaluasi tujuan pesan.
- **Penggunaan Media yang Aman:** Literasi media juga mencakup penggunaan media secara aman dan bertanggung jawab, termasuk privasi online dan perlindungan dari penipuan atau manipulasi.

2. Pemahaman Kritis

Pemahaman kritis melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara mendalam. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pemahaman kritis membantu siswa untuk mengidentifikasi dan menanggapi disinformasi dengan bijaksana. Beberapa aspek pemahaman kritis termasuk:

- **Analisis Argumen:** Siswa diajarkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen secara logis, termasuk mengenali premis, kesimpulan, dan bukti yang mendukung.
- **Pemikiran Analitis:** Mempelajari cara berpikir analitis, termasuk kemampuan untuk menghubungkan informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia.
- **Pengembangan Pertanyaan yang Relevan:** Mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis tentang informasi yang mereka temui, termasuk sumbernya, motivasinya, dan implikasinya.

3. Etika Informasi

Etika informasi adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur penggunaan dan penyebaran informasi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, etika informasi membantu siswa untuk memahami tanggung jawab mereka sebagai konsumen dan produsen informasi. Beberapa aspek etika informasi meliputi:

- Kredibilitas dan Keandalan: Siswa diajarkan untuk memprioritaskan informasi yang kredibel dan keandalan, serta menghindari menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau diragukan kebenarannya.
- Hak Cipta dan Plagiarisme: Memahami prinsip-prinsip hak cipta dan pentingnya menghormati hak-hak pemilik asli, serta menghindari praktik plagiat dalam penggunaan informasi.
- Keterbukaan dan Transparansi: Mendorong siswa untuk menjadi transparan dalam penyediaan informasi, termasuk memberikan sumber dan referensi yang jelas serta mengakui kepentingan pribadi atau institusi yang mungkin memengaruhi pandangan mereka.

Implementasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam pendidikan kewarganegaraan, komponen-komponen ini diintegrasikan ke dalam kurikulum dan metode pengajaran untuk membentuk siswa yang mampu menangkal disinformasi. Pendekatan yang relevan termasuk:

- Pembelajaran Berbasis Proyek: Memberikan proyek-proyek yang memungkinkan siswa untuk melatih literasi media, pemahaman kritis, dan etika informasi dalam konteks nyata.
- Diskusi Terbimbing: Mengadakan diskusi yang dipandu tentang isu-isu kewarganegaraan yang memungkinkan siswa untuk berlatih menerapkan pemahaman mereka tentang literasi media, pemahaman kritis, dan etika informasi.
- Penggunaan Studi Kasus: Memanfaatkan studi kasus tentang kasus-kasus disinformasi atau manipulasi informasi dalam konteks sejarah atau politik untuk mengajarkan siswa tentang implikasi dari ketiga komponen tersebut.
- Pelatihan Praktis: Mengadakan pelatihan praktis dalam literasi media, pemahaman kritis, dan etika informasi menggunakan teknik-teknik seperti simulasi, role-playing, atau latihan berbasis kasus.

Metode dan Pendekatan Dalam Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang Efektif Di Era Post-Truth.

Pengertian Era Post-Truth

Era post-truth ditandai dengan prevalensi informasi yang bersifat emosional dan kurangnya penekanan pada fakta obyektif dalam pembentukan opini publik. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan besar untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap informasi yang kompleks. Artikel ini membahas metode dan pendekatan pengajaran yang efektif dalam pendidikan kewarganegaraan di era post-truth.

Era post-truth adalah periode di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Dalam konteks ini, disinformasi (informasi yang salah atau menyesatkan yang disebarkan dengan sengaja) dan misinformasi (informasi yang salah yang disebarkan tanpa niat menyesatkan) menjadi sangat umum. Istilah "post-truth" mulai populer terutama setelah referendum Brexit di Inggris dan pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 2016, di mana emosi dan klaim-klaim yang tidak berbasis fakta sering kali lebih menentukan daripada kebenaran faktual.

Dampak Era Post-Truth di Dunia Pendidikan

Di dunia pendidikan, era post-truth menghadirkan tantangan besar. Tantangan ini mencakup bagaimana guru dan institusi pendidikan dapat membekali siswa dengan kemampuan untuk menavigasi lanskap informasi yang kompleks dan sering kali menyesatkan. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. **Proliferasi Informasi Salah** : Siswa sering terpapar pada informasi yang salah atau menyesatkan melalui media sosial dan internet. Hal ini membuat mereka rentan terhadap misinformasi dan disinformasi.
2. **Kepercayaan Terhadap Fakta Menurun** : Dalam era post-truth, kepercayaan terhadap fakta ilmiah dan sumber informasi yang dapat dipercaya sering kali menurun. Hal ini dapat mengakibatkan siswa mempertanyakan validitas sumber-sumber yang sebelumnya dianggap kredibel.

3. **Polarisasi Opini** : Disinformasi sering kali digunakan untuk memperkuat bias dan pandangan yang sudah ada, yang pada gilirannya dapat menyebabkan polarisasi di kalangan siswa dan masyarakat secara umum.

Strategi Menghadapi Era Post-Truth dalam Pendidikan

Untuk menghadapi tantangan era post-truth, dunia pendidikan harus mengadopsi strategi-strategi yang efektif. Beberapa pendekatan yang penting antara lain:

1. **Literasi Media** : Mengajarkan siswa cara mengevaluasi dan memverifikasi sumber informasi. Literasi media melibatkan kemampuan untuk mengenali bias, memahami konteks, dan mengevaluasi kredibilitas sumber.
2. **Pemikiran Kritis** : Pendidikan kewarganegaraan harus mendorong pemikiran kritis, di mana siswa diajarkan untuk menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, dan membentuk pendapat berdasarkan penilaian yang matang.
3. **Etika Informasi** : Siswa perlu memahami etika dalam menggunakan dan menyebarkan informasi. Ini termasuk menghormati hak cipta, menjaga privasi, dan berbagi informasi secara bertanggung jawab.
4. **Penggunaan Teknologi Digital** : Memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan, termasuk menggunakan alat-alat digital yang dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran literasi informasi dan media.
5. **Diskusi Kelas yang Kritis** : Mengadakan diskusi di kelas tentang isu-isu aktual dan kontroversial untuk melatih siswa dalam berdebat secara konstruktif dan memahami berbagai perspektif.
6. **Pendekatan Berbasis Proyek** : Melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang memerlukan penelitian dan analisis informasi. Ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan investigatif dan evaluatif.

Era post-truth menantang dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan metode pengajaran yang dapat membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi informasi yang kompleks dan sering kali menyesatkan. Literasi media, pemikiran kritis, dan etika informasi adalah komponen kunci dalam strategi pendidikan untuk menghadapi era ini. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat memainkan peran

penting dalam membentuk individu yang mampu berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam era post-truth.

Di era post-truth, metode pendidikan yang baik harus mampu membekali siswa dengan keterampilan untuk mengenali, menganalisis, dan menangkal disinformasi. Berikut adalah beberapa metode pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Literasi Media dan Informasi

Mengajarkan literasi media adalah kunci untuk membantu siswa memahami bagaimana informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Ini mencakup:

- **Analisis Sumber:** Mengajarkan siswa untuk memeriksa sumber informasi, termasuk penulis, tanggal publikasi, dan tujuan dari informasi tersebut.
- **Identifikasi Bias:** Melatih siswa untuk mengenali bias dalam teks dan media, baik yang eksplisit maupun implisit.
- **Verifikasi Fakta:** Mengajarkan teknik-teknik untuk memverifikasi fakta menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan alat pengecekan fakta online.

2. Pemikiran Kritis

Pemikiran kritis memungkinkan siswa untuk mengevaluasi informasi secara mendalam. Metode yang dapat digunakan meliputi:

- **Analisis Argumen:** Mengajarkan siswa untuk membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid, serta mengenali logika yang cacat.
- **Debat dan Diskusi:** Mendorong debat yang terstruktur di kelas untuk melatih siswa dalam menyusun dan mempertahankan argumen mereka berdasarkan bukti yang kuat.
- **Studi Kasus:** Menggunakan studi kasus nyata untuk menganalisis bagaimana informasi dapat dimanipulasi dan dampaknya terhadap masyarakat.

3. Pembelajaran Berbasis Proyek

Pendekatan berbasis proyek memungkinkan siswa untuk terlibat dalam penelitian mendalam dan kolaboratif. Contoh proyek yang relevan termasuk:

- **Penelitian Sosial:** Siswa melakukan penelitian tentang isu-isu sosial yang aktual, mengumpulkan data, dan menyusun laporan yang kritis.
- **Pengembangan Kampanye Informasi:** Siswa merancang dan melaksanakan kampanye informasi publik tentang topik-topik penting, seperti literasi digital atau kesehatan masyarakat.

4. Penggunaan Teknologi Digital

Teknologi digital dapat meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran interaktif. Metode yang dapat diterapkan meliputi:

- **Platform Pembelajaran Online:** Menggunakan platform seperti Moodle, Google Classroom, atau Edmodo untuk menyediakan materi pembelajaran dan forum diskusi.
- **Media Sosial:** Menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran untuk menganalisis bagaimana informasi disebarkan dan bagaimana menyikapi konten yang menyesatkan.
- **Simulasi dan Game Edukatif:** Menggunakan simulasi dan game yang dirancang untuk mengajarkan literasi media dan pemikiran kritis.

5. Pembelajaran Kolaboratif

Pembelajaran kolaboratif menekankan kerja sama antara siswa untuk menyelesaikan tugas dan proyek bersama. Ini dapat mencakup:

- **Kelompok Belajar:** Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan dan menganalisis topik tertentu.
- **Diskusi Kelompok:** Mengadakan diskusi kelompok untuk membahas isu-isu kontemporer, yang memungkinkan siswa berbagi perspektif dan membangun pemahaman bersama.

6. Pengajaran Berbasis Diskusi

Metode ini melibatkan siswa dalam diskusi yang mendalam tentang isu-isu yang relevan, melatih mereka dalam berpikir kritis dan berbicara secara efektif. Cara mengimplementasikannya termasuk:

- **Socratic Seminars:** Diskusi terbuka yang dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang menantang pemikiran siswa.
- **Debat Terstruktur:** Debat yang terorganisir dengan baik di mana siswa harus mendukung posisi mereka dengan bukti yang kuat.

7. Pendidikan Karakter dan Etika Informasi

Mengintegrasikan pendidikan karakter untuk mengajarkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan informasi. Ini dapat melibatkan:

- **Pembelajaran Berbasis Nilai:** Mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam konteks penggunaan informasi.
- **Diskusi Etika:** Mengadakan diskusi tentang dilema etika terkait penggunaan informasi dan teknologi.

8. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)

Pendekatan ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata yang membutuhkan penelitian dan analisis mendalam. Ini dapat mencakup:

- **Studi Kasus Nyata:** Menganalisis masalah nyata yang dihadapi masyarakat dan merumuskan solusi yang berbasis pada data dan bukti.
- **Proyek Penelitian:** Siswa bekerja dalam tim untuk meneliti masalah tertentu dan menyusun laporan yang komprehensif.

Strategi Menangkal Disinformasi dan Hoaks

Penggunaan teknologi dan media digital dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi informasi

Penggunaan teknologi dan media digital dalam pendidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi informasi sekaligus mencegah disinformasi dan hoaks.

Pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan literasi informasi, yaitu kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, mengolah, dan menggunakan informasi secara efektif dan bertanggung jawab.

Pembelajaran berbasis teknologi dan media digital dapat memberikan akses ke berbagai sumber informasi yang beragam dalam waktu yang relatif singkat. Sumber informasi yang bisa diperoleh dari media digital antara lain jurnal, video pembelajaran, artikel ilmiah, dan buku elektronik. Dengan banyaknya informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, tentu saja perlu dilakukan analisis dan verifikasi. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kemampuan literasi informasi.

Proses analisis dan verifikasi informasi ini diharapkan mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan sesuai dengan fakta yang ada sehingga dapat mencegah disinformasi dan hoaks. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih kritis dan selektif dalam menerima dan menggunakan informasi. Selain itu, kemampuan literasi informasi yang baik juga akan mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna, serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di era digital.

Kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak dalam pencegahan disinformasi dan hoaks

Pencegahan disinformasi dan hoaks tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemerintah saja atau lembaga pendidikan saja, tetapi memerlukan kolaborasi atau kerja sama untuk memerangi disinformasi dan hoaks. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran informasi palsu serta meningkatkan literasi digital. Lembaga pendidikan berperan mendidik dan memberikan pemahaman mengenai literasi digital serta menumbuhkan budaya kritis dalam kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, pemerintah juga bertanggung jawab atas regulasi terkait penyebaran informasi palsu atau hoaks, pemanfaatan teknologi, dan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya lembaga pendidikan dan pemerintah, tetapi juga diperlukan peran organisasi masyarakat dalam pemantauan, pelaporan, dan pembangunan komunitas yang positif. Selain itu, media massa juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan terverifikasi.

Dari kerja sama berbagai pihak ini, diharapkan masyarakat dapat teredukasi dan terhindar dari disinformasi serta hoaks, sehingga dapat mencegah konflik atau masalah yang timbul dari hal tersebut. Penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya.

Contoh program dan komunitas di Indonesia dalam upaya pencegahan disinformasi dan penyebaran berita hoaks

Di Indonesia, terdapat berbagai program dan komunitas yang berperan dalam pencegahan disinformasi dan penyebaran berita hoaks. Salah satunya adalah Program Literasi Digital yang diluncurkan oleh Kominfo. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan digital, termasuk kemampuan mengenali dan menghindari hoaks. Kegiatan yang dilakukan mencakup pelatihan dan seminar di berbagai daerah serta kampanye di media sosial. Hasilnya, banyak peserta yang merasa lebih mampu mengenali dan menghindari informasi palsu setelah mengikuti program ini.

Selain itu, ada juga Indonesia Hoax Crisis Center (HCC), sebuah inisiatif dari pemerintah daerah Yogyakarta yang bekerja sama dengan komunitas lokal, media, dan akademisi untuk mengurangi penyebaran hoaks. HCC menggunakan pendekatan edukasi dan penegakan hukum, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan klarifikasi dan informasi yang benar, sehingga berhasil mengurangi penyebaran hoaks di Yogyakarta.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) juga turut berperan dalam upaya ini melalui program "Cek Fakta". Program ini berkolaborasi dengan berbagai media untuk memverifikasi berita yang beredar. Dengan keberadaan Mafindo, banyak berita palsu berhasil diidentifikasi dan diklarifikasi melalui portal cekfakta.com dan media sosial mereka, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya verifikasi informasi.

Kesimpulan

Pendidikan kewarganegaraan di era post-truth menjadi sangat esensial dalam membekali generasi muda dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang

ditimbulkan oleh disinformasi dan hoaks yang meluas. Era post-truth, di mana emosi dan opini sering kali mengesampingkan fakta objektif, menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi dan memberikan penekanan lebih pada keterampilan kritis dan literasi informasi.

Pendidikan kewarganegaraan di era post-truth sangat penting untuk membekali generasi muda dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berpengetahuan. Dengan fokus pada literasi informasi, berpikir kritis, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi serta etika, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih tahan terhadap disinformasi dan hoaks. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan penggunaan teknologi yang bijak juga merupakan kunci untuk mencapai tujuan ini. Lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil harus bersinergi dalam menciptakan kurikulum yang responsif terhadap tantangan disinformasi.

Dengan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dan adaptif terhadap tantangan era post-truth, diharapkan akan terbentuk generasi yang lebih kritis, tahan terhadap disinformasi, dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Masyarakat yang dihasilkan dari pendidikan semacam ini akan lebih berinformasi, mampu berdialog secara sehat, dan berkontribusi pada penguatan demokrasi. Keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diukur dari kemampuan individu untuk mengenali hoaks, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk membangun komunitas yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Harapannya, pendidikan kewarganegaraan yang efektif akan menghasilkan warga negara yang lebih kritis, berinformasi baik, dan mampu berkontribusi positif dalam kehidupan demokratis.

Referensi

- Argo, M. (2022). Strategi Guru Dalam Meningkatkan Literasi Digital Pada Siswa. *e journal unesa*, 640-642.
- Cherilyn. (2019). "Jurnalisme, "berita palsu", & disinformasi: buku pegangan untuk pendidikan dan pelatihan jurnalisme". *UNESCO*.
- Delia. (2023). *Edunitas*. Retrieved from Edunitas.com: <https://edunitas.com/edunews/detail/post-truth-dalam-pendidikan>
- Hartono, D. (2018). Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking. *eprints.untirta.ac.id*, 70-71.

- Montessori, M. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dan Keterampilan Berpikir. *Media Neliti*.
- Oktaviani, D. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memerangi Hoaks. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7700-7702.
- Sinta, P. (2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Moral Peserta Didik Dalam Menanggapi Berita Hoax. *Buana Ilmu*.
- Sutrisno. (2016). BERBAGAI PENDEKATAN DALAM PENDIDIKAN NILAI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*.
- Verry, R. (2023, Juli 26). *Web Perpuskita*. Retrieved from Perpus Kita: <https://web.perpuskita.id/meningkatkan-kualitas-pembelajaran-7-metode-mengajar-efektif-bagi-guru/>